

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1. Kesimpulan**

Mengacu pada hasil analisis dengan informan, maka penulis menarik kesimpulan Partisipasi Perempuan Dalam Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa Wologai Tengah cukup tinggi, yang dapat diukur dari beberapa aspek sebagai berikut :

##### **a. Partisipasi Perempuan**

Dalam partisipasi perempuan ada 4 indikator yang diteliti maka ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pendaftaran pemilih, Pencalonan anggota, Pemungutan suara, Penghitungan suara.

Berdasarkan hasil yang telah dikemukakan oleh penulis pada bab sebelumnya mengenai Partisipasi Perempuan Dalam Rekrutmen Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Wologai Tengah Kecamatan Detusoko Kabupaten Ende diambil suatu kesimpulan bahwa partisipasi perempuan di Desa Wologai Tengah terlihat cukup tinggi dalam berbagai tahapan partisipasi perempuan. Kesadaran untuk menyuarakan aspirasi dari kaum perempuan kepada pemerintah desa yang menjadi acuan bagi calon anggota BPD perempuan untuk terlibat didalamnya. Pentingnya keterwakilan perempuan dalam BPD, Musdes, maupun Musrenbangdes merupakan salah satu upaya memunculkan kebijakan, program maupun kegiatan yang mampu menjawab kebutuhan strategis. Menggerakkan

perempuan dalam setiap tahapan pembangunan desa diantaranya dapat dimulai melalui adanya perempuan dalam keanggotaan BPD.

b. Prosedur Rekrutemen Badan Permusyawaratan Desa

Prosedur rekrutemen Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan indikator : Pemberitahuan berakhirnya masa jabatan keanggotaan BPD, Pembentukan panitia pemilihan anggota BPD, Penjaringan bakal calon anggota BPD, Penyaringan dan penetapan calon anggota BPD, Pelaksanaan pemilihan calon anggota BPD, Penetapan hasil pemilihan, Penetapan anggota BPD, Penyampaian hasil pemilihan, Peresmian anggota BPD. Berdasarkan hasil yang diteliti bahwa prosedur pemilihan BPD di Desa Wologai Tengah berjalan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

## **6.2. Saran**

1. Pemerintah Desa sebagai wilayah administrasi pemerintahan terendah perlu lebih memperhatikan kebutuhan masyarakatnya sendiri sebagai aset pembangunan masyarakat Desa Wologai Tengah pada khususnya.
2. Kepada masyarakat Wologai Tengah untuk tetap terlibat aktif dalam kegiatan pembangunan desa. Terlibat pada saat musrenbangdes ataupun musrenbangdes agar dapat memberikan aspirasi-aspirasi untuk pembangunan di Desa Wologai Tengah.
3. Untuk Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tetap bekerja sama dan lebih terlibat aktif dalam pembangunan Desa Wologai Tengah dan pada khususnya bagi BPD perempuan bisa mewakili, mengawal dan

mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut mengambil bagian dalam proses pembangunan.

## DAFTAR PUSTAKA

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Erlangga: Jakarta.

Davis, Keith . 1195. *Perilaku Dalam Organisasi*. Jakarta: Erlangga.

Wasistiono, Sadu, Tahir Irwan. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Fokusmedia: Bandung.

Sofyan, Effendi. 1982. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES.

## SKRIPSI

Ahmad Wildan Sukhoyya.2018. *Pemilihan Wanita Dalam Badan Permusyawaratan Desa*.

Ani purwanti. 2019. *Partisipasi Perempuan pada Lembaga Legislatif Tahun 2014-2019 di Provinsi Jawa Timur*.

Evodius Landu Praing. 2019. *Studi Tentang Beberapa Hambatan Dalam Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilihan Legislatif Di Kabupaten Sumba Timur (studi kasus di daerah pemilihan 4 Kabupaten Sumba Timur)*.

Siti Maya Sari. 2015. *Persepsi Masyarakat Tentang Partisipasi Perempuan*.

Mardikanto. 2003. *Redefenisi Penyuluhan Penerbit Puspa*.

Supriyono. 2017. *Partisipasi Politik Anggota Badan Permusyawaratan Desa Perempuan Di Tiga Desa Kabupaten Gunungkidul (Studi kasus di Desa Baleharjo Kecamatan Wonosari, Desa Nglipar Kecamatan Nglipar, dan Desa Petir Kecamatan Rongkop, Kabupaten Gunungkidul)*.

Mardikanto. 2003. *Redefenisi Penyuluhan Penerbit Puspa*.

Falua Jisokhi Haluana'a. 2019. *Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan (Studi Di Desa Orahili Kecamatan Pulau-Pulau Batu Kabupaten Nias Selatan)*.

Veitzal Rivai. 2009. *Manajemen Sumber Daya*, Jakarta: Rajawali Pers.

Hani Handoko. 2001. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, edisi 2, Yogyakarta: BPFE.

Agnes Heni Triyuliana, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (yogyakarta :CV Andi Offset,2008) hal. 113.

Mathis, Robert. L, Jackson, Jhon H. 2001. Manajemen Sumber Daya manusia.

**JURNAL**

Jurnal Djafar. 2008. Vol.1 No.1

**UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN-PERATURAN**

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa.

Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.